



djppr



## LAPORAN ANALISIS RISIKO

# *Sovereign Asset and Liability Management (SALM)*

Tahun 2025

# LAPORAN ANALISIS RISIKO

## SOVEREIGN ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT (SALM) TAHUN 2025

© 2025, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

### PENGARAH:

SUMINTO

*DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO*

### PENANGGUNG JAWAB:

TONY PRIANTO

*DIREKTUR PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA*

### TIM PENYUSUN:

*TIM KERJA ANALISIS RISIKO FISKAL DAN MONETER*

- Novijan Janis (Ketua Tim Kerja)
- Indria Wardhani (Anggota Tim Kerja)
- Sunandar (Anggota Tim Kerja)
- Dokki Dipa Perkasa (Anggota Tim Kerja)
- Ismail Efendi (Anggota Tim Kerja)
- Puspa Kusuma Pertiwi (Anggota Tim Kerja)
- Surya Adhi Nugroho (Anggota Tim Kerja)
- Manasye Agustinus Siregar (Anggota Tim Kerja)

### PENERBIT:

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

### HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

DILARANG MEMPERBANYAK, MENCETAK ATAUPUN MENERBITKAN SEBAGIAN  
ATAU SELURUH ISI BUKU TANPA SEIZIN TERTULIS DARI PENERBIT

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Melewati ketidakpastian geopolitik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pendapatan menengah atas (*upper middle income*) yang menunjukkan kinerja kuat dan stabil. Perekonomian Indonesia tumbuh relatif tinggi, di mana pada tahun 2024 berhasil tumbuh sebesar 5,03%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yaitu 3,3%. Pemulihan ini didukung dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dalam menanggulangi gejolak ekonomi global dan memberikan stimulus bagi perekonomian domestik. Selain itu, terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga, berlanjutnya aktivitas investasi, serta membaiknya kinerja sektor eksternal turut memberikan dukungan yang signifikan bagi penerimaan negara. Kinerja APBN pun menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga dan disiplin, tercermin dari realisasi defisit Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar 2,30% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target defisit APBN tahun 2024 sebesar 2,44% terhadap PDB.

Seiring dengan capaian tersebut, perekonomian nasional masih dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang perlu terus dicermati. Normalisasi kebijakan moneter global, termasuk arah kebijakan suku bunga negara maju, dinamika geopolitik yang masih berlanjut, serta dampak perubahan iklim terhadap rantai pasokan global berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap perekonomian domestik. Kondisi tersebut terus dikelola secara optimal guna menjaga eksposur risiko terhadap keuangan negara tetap terkendali. Selain itu, hal ini sekaligus meningkatkan urgensi atas manajemen risiko pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas, sistematis, dan komprehensif untuk menjaga kesinambungan fiskal sehingga APBN dan neraca negara dapat dijaga sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya yang relevan dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara yang lebih komprehensif adalah melalui analisis risiko *Sovereign Asset and Liability Management* (SALM). Fokus SALM adalah menyajikan gambaran yang holistik terkait kondisi neraca di tingkat negara, tidak lagi menggunakan perspektif parsial yang hanya berfokus pada entitas tertentu. Hal ini sangat penting mengingat signifikansi hubungan transaksi keuangan antarentitas sektor publik, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi menjadi media transmisi risiko antarsektor. Oleh karena itu, pendekatan SALM ini sangat relevan merefleksikan peran Kementerian Keuangan yang sangat krusial dalam pengelolaan risiko keuangan negara secara utuh, baik peran sebagai *Chief Operational Office* (COO), *Chief Financial Officer* (CFO), kuasa kekayaan negara yang dipisahkan, dan stabilisator sektor keuangan. Terlebih lagi, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan, dimana risiko neraca konsolidasi sektor publik menjadi salah satu taksonomi dalam kerangka manajemen risiko dimaksud.

Berdasarkan kondisi ekonomi baik global maupun domestik sepanjang tahun 2024, kondisi neraca sektor publik baik secara agregat maupun individual digambarkan sebagai berikut:

1. Secara agregat, neraca konsolidasi sektor publik memiliki ekuitas positif dengan risiko yang terkendali. Neraca konsolidasi sektor publik 2024 memiliki *positive networth* yang tercermin dari

nilai ekuitas yang meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini melanjutkan penguatan yang telah terjadi tahun sebelumnya. Dari aspek risiko, indikator likuiditas agregat dan solvabilitas agregat cukup stabil masih berada dalam batas yang terkendali. Perbaikan juga terjadi pada risiko nilai tukar, di mana gap antara kewajiban valas dengan aset valas mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang progresif dan terukur serta integrasi yang baik dengan kebijakan moneter, telah membuahkan hasil positif kepada makro ekonomi Indonesia.

2. Pada level individu, Neraca Pemerintah Pusat menunjukkan ekuitas positif sebagai indikasi terjaganya kesinambungan fiskal dan operasional Pemerintah serta kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Ekuitas pemerintah tetap terjaga pada level yang ideal sehingga mendukung kapasitas fiskal dalam menghadapi dinamika ekonomi. Di sisi lain, posisi fiskal tetap terkendali dengan defisit di bawah batas 3% PDB (Produk Domestik Bruto), likuiditas kas yang terjaga, keseimbangan primer yang berimbang, dan rasio utang terhadap PDB yang aman. Pengelolaan utang, eksposur valas, serta strategi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) yang diimbangi investasi jangka panjang seperti peningkatan kapasitas BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), mencerminkan mekanisme *natural hedging* yang semakin efektif.
3. Neraca Bank Indonesia menunjukkan peningkatan karena peningkatan aset yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban. Bank Indonesia juga mencatatkan surplus lebih tinggi dari surplus pada 2023, sehingga menghasilkan rasio modal Bank Indonesia yang terus mengalami peningkatan.
4. Kinerja BUMN sektor keuangan menunjukkan pertumbuhan aset, ekuitas, dan laba yang relatif solid dengan struktur pendanaan yang tetap efisien, sementara risiko perbankan berada pada level yang terkendali, ditunjukkan oleh pemenuhan Giro Wajib Minimum, rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang menurun dan berada di bawah ambang batas, serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tetap kuat di atas ketentuan minimum. Secara agregat kondisi permodalan dan manajemen risiko BUMN perbankan tetap pruden, sehingga mampu menjaga fungsi intermediasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi keuangan negara.
5. BUMN sektor non-keuangan mengalami situasi yang cukup beragam. Dari sisi likuiditas, sebagian besar BUMN berada pada tingkat yang relatif memadai. Dari sisi solvabilitas, terlihat adanya perbaikan struktur permodalan pada sejumlah BUMN melalui peningkatan ekuitas dan penurunan rasio utang. Kondisi keuangan BUMN non-keuangan secara umum menunjukkan tren pemulihan dan stabilisasi, penguatan tata kelola keuangan, pengelolaan risiko, serta keberlanjutan dukungan kebijakan tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan kinerja BUMN ke depan.

Sampai dengan tahun 2026, paparan risiko terhadap neraca konsolidasi sektor publik diproyeksikan masih berlangsung di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang cukup tinggi. Dari sisi global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga acuan *The Fed*, fragmentasi geopolitik, serta meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat perubahan iklim berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar, arus modal, dan likuiditas global. Dari sisi domestik, tantangan struktural seperti dampak cuaca ekstrem terhadap sektor-sektor produktif, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tetap besar serta proses pemulihan bencana alam di beberapa daerah juga menjadi faktor yang perlu dikelola secara cermat dalam menjaga ketahanan neraca konsolidasi sektor publik. Meskipun demikian, penerapan disiplin fiskal yang berkelanjutan, kebijakan moneter yang pruden, serta peran strategis BUMN sebagai jangkar stabilitas ekonomi diproyeksikan mampu menjaga ekuitas neraca konsolidasi sektor publik tetap berada dalam tren perbaikan hingga 2026.

Dalam rangka mengelola risiko tersebut secara efektif, diperlukan penguatan manajemen risiko neraca konsolidasi sektor publik yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Penguatan koordinasi antarentitas sektor publik yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Danantara, menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko secara lintas sektor. Selain itu, monitoring yang cermat dan sistematis terhadap indikator makroekonomi global dan domestik, termasuk perkembangan suku bunga, nilai tukar, inflasi, harga komoditas, serta risiko iklim dan geopolitik, perlu terus diperkuat guna mengantisipasi potensi tekanan terhadap postur neraca negara.

Dari aspek kebijakan dan regulasi, dukungan regulasi yang lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat koordinasi antar otoritas, serta meningkatkan kapasitas pencegahan dan penanganan risiko sistemik.

Dari perspektif neraca, pengendalian pertumbuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan BUMN dilakukan secara pruden melalui optimalisasi manajemen portofolio utang, pemanfaatan instrumen pembiayaan kreatif, serta pendalaman pasar keuangan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Upaya tersebut bertujuan untuk memperbaiki struktur kewajiban, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan aset dan liabilitas, serta memperkuat kesehatan neraca negara secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, penguatan cadangan devisa tetap menjadi prioritas strategis dalam menjaga ketahanan eksternal dan mengelola risiko nilai tukar. Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian utang valas, peningkatan kinerja ekspor, penguatan iklim investasi dan pariwisata, perluasan penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) dan QRIS, serta optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor. Seluruh langkah tersebut, yang didukung oleh sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan korporasi, diharapkan mampu menjaga stabilitas neraca konsolidasi sektor publik dan memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi nasional dalam jangka menengah.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

djppr 

**Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda | Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta  
Tel. 021-3864778; Fax. 021-3843712  
[www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)